

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat akan demokratisasi terus digalakkan di Negara Mesir pasca berakhirnya pemerintahan presiden Hosni Mubarak yang telah memimpin selama 30 tahun. Di negara ini demokrasi seakan merupakan suatu hal yang dirindukan oleh masyarakat yang telah mengecap lamanya kediktatoran Presiden Hosni Mubarak. Demokrasi kerap kali digunakan sebagai slogan yang sangat menggoda karena terlihat menjanjikan suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintah berjalan beriringan bersama rakyat dengan mengutamakan kedaulatan ada ditangan rakyat tanpa melupakan kebebasan dari individu itu sendiri (Supardan, 2015).

Menurut Robert Dahl demokrasi dapat ditafsirkan dengan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya, kebebasan dalam mempublikasikan argumennya atau pikirannya, tidak ada larangan bagi setiap individu untuk berorganisasi atau berkumpul tanpa terkecuali (Huntington, 1997). Demokratisasi didefinisikan sebagai perubahan dalam rezim politik di dalam negara yang berdaulat dari non demokrasi ke demokrasi (Samuels, 2017). Sehingga dalam artian lain demokratisasi ialah perubahan dari rezim non demokratis ke rezim yang demokratis sehingga terciptanya kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, kebebasan dalam mempublikasikan argumennya atau pikirannya, tidak ada larangan bagi setiap individu untuk berorganisasi atau berkumpul.

Menelaah lebih lanjut demokrasi yang ditafsirkan oleh Dahl tersebut merupakan tujuan dari adanya demokratisasi di suatu negara yang dipimpin oleh rezim yang otoriter. Pada era sekarang ini, demokrasi sering digaungkan sebagai sistem yang paling ideal karena dapat menjadi wadah dalam menampung segala aspirasi masyarakat untuk

menciptakan pemerintahan yang sebaik-baiknya. Jika suatu individu mengharapkan suatu kebebasan sebagai nilai sosial yang paling tinggi, maka ia juga pasti mengharapkan adanya demokrasi (Supardan, 2015).

Adanya kebebasan menentukan nasib sendiri, kebebasan mengeluarkan segala pendapat, tidak adanya larangan untuk memilih pilihannya sendiri, dan ketiadaan paksaan terhadap keyakinan dalam beragama menjadikan demokrasi seperti primadona bagi negara-negara di dunia terutama bagi negara-negara yang masih berstatus sebagai negara berkembang. Membahas tentang demokrasi selalu disangkut-pautkan dengan sesuatu yang cerah dan indah seperti warga negara ideal, representasi dari rakyat dan pedoman kehidupan (Crick, 2002). Banyak negara yang dipimpin oleh rezim otoriter berupaya menjadi negara yang lebih demokratis. Rezim-rezim otoriter yang telah memerintah suatu negara cukup lama, didesak kemudian ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri yang menginginkan agar demokrasi di negara nya ditegakkan. Demokratisasi seakan-akan menjadi alasan bagi kebangkitan negara-negara yang sudah lama menginginkan perubahan terutama ditatanan pemerintah. Rakyat menginginkan kebebasan dalam menciptakan negara yang ideal bagi diri mereka sendiri. Seperti ungkapan dari bahasa latin *vox populi vox dei* yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Apabila suara dari rakyatnya sendiri tidak dapat didengar oleh seorang penguasa bagaimana ia bisa melaksanakan suatu kebaikan yang esensinya berasal dari Tuhan.

Mesir adalah sebuah negara yang berbatasan dengan Israel dan Laut Merah di sebelah timur, Sudan di sebelah selatan, Libya di sebelah barat dan Laut tengah di sebelah utaranya (Jackson, 2007). Dimana sebagian besar wilayah Mesir terdiri dari gurun pasir. Negara ini memiliki dua sumber daya alam yakni minyak bumi dan gas alam yang terletak di sepanjang garis pantai Teluk Suez (Russel, 2013). Negara Mesir yang pernah dipimpin oleh seorang presiden bernama

Hosni Mubarak yang telah menjabat dari tahun 1981 sampai tahun 2011 diturunkan secara paksa oleh rakyatnya sendiri melalui jalur demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama 18 hari. Revolusi yang terjadi di Mesir tersebut merupakan bagian dari serangkaian revolusi berbentuk demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Timur Tengah yang dimulai pada tahun 2010 hingga sekarang. Dalam protes yang dilakukan oleh masyarakat terdiri dari demonstrasi, pawai atau arak-arakan, serangan, dan penggunaan media sosial yang bertujuan agar memberikan kesadaran kepada khalayak luas akan adanya tindakan represif serta pembatasan yang dilakukan oleh seorang penguasa (Jatmika, 2014) Gelombang revolusi ini dikenal dengan istilah *Arab spring* yang meliputi negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, Bahrain, dan Suriah.

Demonstrasi menuntut demokratisasi di Mesir berlangsung selama 18 hari yang minspirasi dari gerakan revolusi sipil di Tunisia yang berhasil menurunkan pemerintahan Presiden Zine El Abidine Ben Ali dengan situasi sosial dan politik yang hampir sama dengan Mesir (Alin, 2016). Revolusi yang terjadi di Tunisia pula menjadi awal dari fenomena *Arab spring* di kawasan Timur Tengah. Fenomena ini umumnya berkecimpung didalamnya adalah *Islamic dominated parliament* melawan *Protest movement*. *Islamic dominated parliament* adalah model autokrasi dimana tampuk kepemimpinan suatu negara dipegang sangat lama dan kemudian tampuk kepemimpinan tersebut akan diwariskan kepada keturunannya sendiri (Salma, 2012). Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep demokrasi yang mengutamakan jalannya pemerintahan yang bersumber dari rakyat. Pemerintahan di negara-negara kawasan Timur Tengah yang banyak menjalankan praktek dinasti ditambah lagi dengan maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme telah memantik api perlawanan dari rakyatnya sendiri.

Adanya keterikatan emosional diantara masyarakat di kawasan Timur Tengah seperti mayoritas negara-negara di

kawasan Timur Tengah merupakan muslim dan berasal dari bangsa Arab. Menjadikan masyarakat di kawasan ini memiliki satu entitas ketika ada gejolak yang terjadi di negara tertentu di Timur Tengah dalam hal ini ialah perlawanan terhadap rezim yang otoriter. Ketika rakyat Tunisia berhasil menurunkan Zine El Abidine Ben Ali yang telah menjabat sebagai Presiden Tunisia selama lebih dari 20 tahun. Peristiwa tersebut memotivasi mayoritas rakyat di negara lainnya untuk melakukan aksi serupa. Termasuk dengan Negara Mesir yang merupakan negara kedua yang terkena imbas dari fenomena *Arab spring* ini.

Setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Hosni Mubarak. Banyak kalangan yang menilai bahwa angin segar dari demokrasi di negara Mesir kembali bertiup. Sebelum terselenggaranya prosesi pemilu tampuk pemerintahan dipegang oleh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata yang dipimpin oleh Muhammad Hussein Tantawi yang merupakan kepala negara secara *de facto* dari negara Mesir. Pihak militer memegang pemerintahan sejak diumumkannya pengunduran diri Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011 hingga Mesir siap melaksanakan pemilihan umum pada 28 November 2011. Pemilu tersebut dimenangkan oleh Muhammad Mursi yang memperoleh dukungan sebanyak 51,7 persen mengungguli pesaingnya Ahmad Shafiq. Muhammad Mursi kemudian dilantik pada 30 Juni 2012.

Mursi yang merupakan seorang presiden pertama yang dipilih berdasarkan pemilu yang sah pasca pemerintahan Hosni Mubarak nyatanya hanya dapat memimpin Mesir selama kurang lebih satu tahun sebelum akhirnya di kudeta. Rezim yang memimpin setelah rezim yang tidak demokratis belum tentu menjadi rezim yang demokratis (Huntington, 1997). Mursi dinilai sarat akan kepentingan golongan kelompoknya yakni Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh Hasan Al-Banna pada tahun 1928 di Negara Mesir yang merupakan organisasi unggulan dari revivalis

sunni yang telah ada jauh sebelum kelompok Islam kontemporer lainnya di dunia Arab (Wickham, 2013). Mursi mengangkat anggota-anggota Ikhwanul Muslimin untuk menduduki jabatan-jabatan strategis yang ada di kantor pemerintahan Mesir sebanyak 5 orang diangkat menjadi pejabat di berbagai departemen, 7 orang diangkat menjadi gubernur, 12 orang menjadi asisten gubernur, dan 12 orang diangkat sebagai walikota oleh Mursi (Setyawan, 2013). Keberadaan Ikhwanul Muslimin yang sangat terasa pada masa kepemimpinan Mursi merupakan bentuk dari nepotisme yang dilakukan oleh Mursi. Ikhwanul Muslimin sejak didirikan kerap kali keberadaannya mendapat penolakan serta ganjalan dari pemerintah yang memegang tampuk pemerintahan Mesir (Armandhanu, 2013). Pelarangan keberadaan Ikhwanul Muslimin dimulai pada tahun 1966, pada saat itu Sayyid Qutb dieksekusi mati oleh pemerintah karena dianggap anti pemerintah (Oktorino, 2015). Semasa Mursi berhasil menjadi Presiden Mesir, Ikhwanul Muslimin mendapatkan ruang dalam pemerintahan Mesir yang mana keberadaan Ikhwanul Muslimin sangat mendominasi pada saat itu. Kentalnya aroma Ikhwanul Muslimin di masa Presiden Mursi menjabat menimbulkan spekulasi di beberapa kalangan bahwasanya Presiden Mursi sedang “meng-Ikhwanul Muslimin-kan” negara Mesir (Armandhanu, 2013).

Pada 22 November 2013, Presiden Mursi kembali menimbulkan sebuah kontroversi melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Ia mengeluarkan sebuah dekret yang berisi pemberian kekuasaan penuh atas dirinya sendiri sebagai seorang presiden (Hardoko, 2012). Dikeluarkannya dekret ini mendapat penolakan dari elemen masyarakat khususnya dari kelompok oposisi. Dengan adanya dekret tersebut Muhammad Mursi disebut sebagai Hosni Mubarak gaya baru dimana dengan menggunakan jabatan sebagai seorang presiden, ia melakukan cara-cara agar kekuasaannya tersebut tidak dapat diganggu. Demokratisasi yang diinginkan oleh masyarakat Mesir yang dilakukan dengan menumbangkan rezim Mubarak

melalui demonstrasi besar-besaran dengan harapan pemilihan umum yang sah dapat terjadi. Terpilihnya Muhammad Mursi diharapkan dapat menghapus gaya keditatoran yang dibawa oleh Presiden Hosni Mubarak. Namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh Mursi tidak sejalan dengan asas demokrasi yang paling utama yakni pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Pada 30 Juni 2013 bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Muhammad Mursi, warga Mesir turun ke jalan untuk memuntut agar Mursi mengundurkan diri sebagai Presiden. Demonstrasi ini pada selanjutnya memantik terjadinya bentrokan antara dua kubu yakni kubu pendukung Mursi dan kubu oposisi. Pada 1 Juli pihak militer mengeluarkan ultimatum kepada Mursi untuk mengundurkan diri atau menghadapi pemberontakan dari masyarakat sipil yang mana dalam tenggat waktu 48 jam pihak Militer akan turun tangan apabila Mursi tidak memenuhi tuntutan dari rakyat. Pada 3 Juli 2013 pihak Militer melalui Jendral Abdul Fattah Al Sisi mengeluarkan pernyataan resmi bahwa telah mengambil alih kursi pemerintahan Mesir. Keesokan harinya Adly Mansour selaku Ketua Mahkamah konstitusi Mesir ditunjuk sebagai presiden sementara hingga terselenggaranya pemilu.

Abdul Fattah Al Sisi resmi dilantik menjadi presiden baru Mesir pada 8 Juni 2014. Ia memenangkan pemilu dengan memperoleh 96,9 persen dukungan suara namun kemenangan mutlak dari Al sisi tersebut hanya diikuti oleh 47,45 persen dari total daftar pemilih tetap (Islam, 2014). Pasca kudeta terhadap Mursi yang dilakukan oleh pihak militer menyisakan keraguan akan demokratisasi yang semula digaungkan. Tentu memperoleh kekuasaan melalui cara-cara kekerasan seperti dengan menggunakan kekuatan militer telah menciderai semangat akan demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi yang sejatinya bukan untuk memaksakan kehendak segelintir pihak tetapi untuk kemaslahatan bersama. Di tangan Abdul Fattah Al

Sisi saat ini harapan akan terwujudnya demokratisasi di Mesir dititipkan.

Al Sisi dalam pidatonya mengemukakan bahwasanya ia ingin mewujudkan kebebasan serta keadilan sosial di Negara Mesir (Saputri, 2014). Adanya kebebasan merupakan aspek penting bagi keberhasilan proses demokratisasi. Namun pada kenyataannya pada masa kepemimpinan Al sisi kebebasan itu tampaknya hanya berupa keinginan semu belaka. Sikap pemerintah terhadap kelompok oposisi sangat bertolak belakang dengan apa yang Al sisi ucapkan ketika pidato pelantikannya. Anggota dari Ikhwanul Muslimin banyak ditangkap oleh otoritas Mesir sejak organisasi tersebut dianggap oleh pemerintah sebagai organisasi teroris. Tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap Ikhwanul Muslimin merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengahabisi lawan politiknya. Era Al sisi dipenuhi dengan pembatasan terhadap hak-hak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat. Ia mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan untuk melakukan unjuk rasa tanpa adanya izin dari pemerintah (Ardiansyah, 2015). Sebagai negara yang menginginkan adanya demokrasi kebebasan mengeluarkan pendapat oleh masyarakat untuk melakukan sebuah kritik atau masukan kepada masyarakat merupakan suatu hal yang lumrah. Dengan adanya pembatasan tersebut rakyat sudah terkekang kebebasannya untuk menyampaikan segala keresahan ataupun hal lainnya yang ingin disampaikan kepada pemimpinnya. Jalannya pemerintahan cenderung kepada satu pihak yang hanya melibatkan pihak yang berkuasa saja tanpa ada pihak lainnya yang diikuti sertakan. Pembatasan untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sipil saja tetapi kepada media massa yang ada di Negara Mesir. Stasiun televisi ternama asal Qatar yakni Al-Jazeera bersama tiga stasiun televisi lokal lainnya yaitu Al-Yarmouk, Al-Quds dan Ahrar 25 dicabut izinnya untuk melakukan penyiaran di Mesir karena dianggap berpihak dengan Ikhwanul Muslimin (Farah, 2013). Tindakan

pemerintah terhadap pers juga disusul dengan penahanan puluhan wartawan yang dianggap menyebarkan berita palsu. Komite Perlindungan Wartawan mengungkap hasil penelitian mereka yang dilakukan sejak 1 Juni 2015 bahwasanya terdapat 18 wartawan yang ditahan oleh otoritas Mesir yang mana jumlah ini merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 1990 (Adzani, 2015).

Melihat dari situasi negara Mesir yang pada saat pemerintahan Presiden Hosni Mubarak menginginkan adanya perubahan yakni adanya demokratisasi di Mesir justru timbul konflik kepentingan antar golongan yang menginginkan kursi kepemimpinan Negara Mesir. Sejak Hosni Mubarak resmi mengumumkan pengunduran diri pada 11 Februari 2011 hingga akhir 2016 tercatat ada 4 orang yang memegang tampuk kepemimpinan Mesir. *The Economist Intelligence Unit's democracy Index* memperlihatkan indeks demokrasi negara Mesir pada tahun 2011 mendapatkan nilai 3.96, pada tahun 2012 mendapatkan nilai 4.26, pada tahun 2013 mendapatkan nilai 3.27, pada tahun 2014 mendapatkan nilai 3.16, pada tahun 2015 mendapatkan nilai 3.18, dan pada tahun 2016 mendapatkan nilai 3.31 dimana selama rentang tahun dari 2011 hingga 2016 tersebut indeks demokrasi Mesir masih jauh dari batas minimal indeks demokrasi yang ditetapkan oleh *The Economist Intelligence Unit's democracy Index* yakni dengan nilai 6 (The Economist Intelligence Unit's Democracy Index, 2018). Berdasarkan dari indeks demokrasi yang dipaparkan, Negara Mesir pasca digulingkannya Hosni Mubarak dari kursi kepresidenannya belum mengarah kepada jalur demokratisasi yang seharusnya. Demokratisasi yang ingin dilakukan di Mesir justru dapat dikatakan mengalami suatu kegagalan.

B. Rumusan Masalah

Mengapa demokratisasi Mesir pasca Hosni Mubarak pada tahun 2011-2016 mengalami kegagalan?

C. Landasan Teoritik

1. *Frozen Democracy Theory*/Teori Demokrasi Beku

Transisi demokrasi merupakan sebuah proses yang kompleks melalui berbagai macam tahapan dari pemerintahan yang non dmokratis menuju kepada pemerintahan yang demokratis (Sorensen, 2003). Untuk mencapai sebuah negara yang demokratis dapat dijelaskan menggunakan model transisi menuju demokrasi yang dipaparkan oleh Dankwart A Rustow. Rustow menjelaskan bahwa dari pemerintahan non demokratis menjadi pemerintahan yang demokratis terdapat beberapa fase yang harus dilalui yaitu fase persiapan, fase keputusan, dan fase habituasi yang ketiga fase tersebut dilatar belakangi oleh suatu kondisi sebelum menuju kepada fase-fase transisi (Rustow, 1970).

a) Kondisi Latar belakang

Sebelum menuju kepada tiga fase yang telah disebutkan sebelumnya. Sebuah negara apabila ingin mewujudkan demokratisasi di negaranya perlu memiliki suatu kondisi yang menjadi latar belakang terjadinya transisi demokrasi. Kondisi yang melatarbelakangi terjadinya suatu transisi menuju demokrasi ialah adanya persatuan nasional. Adanya persatuan di tingkat nasional diharapkan mayoritas dari masyarakat tidak memiliki keraguan serta keberatan terhadap komunitas poltik yang mereka miliki.

Memilih persatuan nasional sebagai satu-satunya kondisi yang melatarbelakangi terjadinya transisi demokrasi, memperlihatkan bahwa demokrasi tidak meiliki tingkat minimal dalam perkembangan ekonomi atau diferensiasi sosial sebagai syarat terwujudnya demokrasi. Dengan begitu kesempatan

sebuah negara untuk menjadi negara yang demokratis terbuka lebar tanpa membedakan satu sama lainnya.

b) Fase Persiapan

Pada tahapan ini terdapat upaya untuk menghadirkan demokrasi menjadi suatu hal yang nyata. Meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta memerlukan upaya ekstra dalam mewujudkan suatu demokrasi. Demokrasi mungkin bukan tujuan utama yang ingin dicapai terhadap turunnya rezim otoriter, tetapi melalui demokrasi diharapkan dapat dijadikan wadah untuk menghadirkan kesejahteraan, penghargaan atas hak individu, kesetaraan atas keberagaman dan lain sebagainya (Sorensen, 2003).

c) Fase Keputusan

Fase Keputusan bercirikan adanya peraturan yang jelas perihal demokrasi. Pihak elit politik memberikan peluang adanya keberagaman serta melembagakan keberagaman yang ada tersebut. Adanya suatu tata tertib guna menunjang terwujudnya demokrasi di suatu negara sangat dibutuhkan sebagai dasar dari berdirinya negara yang demokratis.

d) Fase Habitiasi

Demokrasi telah menjadi sebuah budaya politik yang dipraktikkan didalam suatu negara. Pada tahapan ini negara sudah dapat dikatakan siap menjadi negara yang demokratis selama tidak ada pemaksaan atas kepentingan pihak-pihak tertentu. Sepanjang pihak yang memiliki kekuatan seperti

kelompok militer atau lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengatur jalannya suatu negara tidak melakukan hal-hal yang menciderai semangat demokrasi, sepanjang itu pula negara tersebut dapat memiliki sistem demokrasi yang kuat.

Dalam kasus demokratisasi di negara Mesir, mayoritas masyarakat bersatu dalam satu entitas untuk mendukung terwujudnya demokrasi dengan melakukan penggulingan terhadap rezim otoriter yang berkuasa pada saat itu. Berhasilnya masyarakat Tunisia dalam menurunkan Zine El Abidine Ben Ali dari tampuk kepemimpinannya. Mendorong rakyat Mesir untuk bersama-sama mendesak agar Presiden Hosni Mubarak berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Mesir pada saat itu. Setelah Mubarak resmi memungukan pengunduran diri, Mesir sudah dikatakan terbebas dari rezim non demokratis dan memulai masuk kepada babak baru menuju negara yang demokratis.

Muhammad Hussein Tantawi dipilih sebagai pemimpin Mesir sementara sekaligus mempersiapkan pemilihan umum untuk menyongsong ditemukannya presiden Mesir yang baru. Memasuki fase persiapan merupakan pintu gerbang bagi Mesir untuk masuk kedalam fase keputusan. Mursi yang terpilih sebagai Presiden Mesir sah pertama setelah Mubarak rupanya tidak serta merta menjadikan demokrasi dapat diterapkan di Mesir. Para pemimpin Mesir setelah Mubarak mengalami kesulitan untuk merumuskan suatu kebijakan demokratis bagi masyarakat Mesir. Negara Mesir yang seharusnya dapat memasuki fase dimana mereka dapat membentuk sebuah tata tertib terkait demokrasi justru masuk kedalam kesalahan rezim otoriter terdahulu dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak demokratis.

Dengan dikudetanya Mursi oleh angkatan bersenjata serta kebijakan Al-Sisi yang mempersempit ruang keberagaman menjadikan Mesir yang seharusnya siap untuk masuk kepada fase habituasi, kembali kepada fase persiapan.

Menurut Georg Sorensen demokrasi yang berkembang menuju tahap yang lebih lanjut dapat gagal ditengah prosesnya atau mengalami kebekuan (Sorensen, 2003). Dalam kata lain ketika suatu tatanan masyarakat berusaha menuju kepada demokrasi maka demokrasi yang ingin dicapai tersebut dapat mengalami kebuntuan sehingga pada akhirnya demokrasi yang diharapkan dapat diwujudkan malah akan mengalami kebekuan. Kebekuan dari demokrasi tersebut disebabkan oleh adanya beberapa hal.

Pertama, pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam hal melakukan perubahan pada aspek-aspek mendasar seperti aspek sosial, politik, dan ekonomi. Adanya perubahan terhadap aspek-aspek mendasar tersebut akan membantu sebuah negara dalam prosesnya menuju negara yang lebih demokratis. Namun sebaliknya apabila pemerintah tidak dapat menciptakan suatu perubahan maka terciptanya negara yang demokratis hanya merupakan angan-angan belaka.

The Global Economy merilis data seputar indeks tentang kebebasan sipil di Negara Mesir. Sepanjang tahun 2011 hingga 2016, Mesir selalu memperoleh nilai 5 dengan menggunakan perhitungan perhitungan bahwa nilai 1 merupakan nilai dengan kebebasan sipil terkuat hingga nilai 7 dengan indeks kebebasan sipil terlemah (Theglobaleconomy.com, 2018). Negara Mesir yang selalu mendapat nilai 5 memperlihatkan bahwa ketiadaannya perkembangan dari situasi domestik negara perihal kebebasan sipil menjadikan negara ini mengalami

kemandekan untuk melakukan perubahan agar dapat lebih baik lagi.

The World Bank menunjukkan indeks stabilitas politik di Negara Mesir dari tahun 2011 hingga tahun 2016 yakni pada tahun 2011 mendapatkan nilai -1.4, pada tahun 2012 mendapatkan nilai -1.4, pada tahun 2013 mendapatkan nilai -1.6, pada tahun 2014 mendapatkan nilai -1.6, pada tahun 2015 mendapatkan nilai -1.5, dan pada tahun 2016 mendapatkan nilai -1.4. Indeks ini menggunakan penilaian bahwa nilai -2.5 menunjukkan bahwa stabilitas politik berada di titik paling lemah serta nilai 2.5 menunjukkan stabilitas politik berada di titik paling kuat (Worldbank.org, 2018). Dari rentang tahun 2011 sampai tahun 2016 stabilitas politik di Negara Mesir belum bisa dikatakan stabil bahkan masih diategorikan sebagai negara dengan stabilitas politik yang lemah.

The Global Economy memperlihatkan data dari rentang tahun 2011 hingga 2016 bahwasanya tingkat inflasi negara Mesir selalu tinggi. Pada tahun 2011 tingkat inflasi Mesir sebesar 10,1%, pada tahun 2012 sebesar 7,1%, pada tahun 2013 sebesar 9,4%, pada tahun 2014 sebesar 10,1%, pada tahun 2015 sebesar 10,4%, dan pada tahun 2016 sebesar 13,8% (Theglobaleconomy.com, 2018). Dari jangka waktu tersebut Mesir selalu menjadi selalu masuk didalam 40 negara dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia dari 123 negara yang ada. Kondisi ekonomi yang tak kunjung menjadi lebih baik dengan tingkat inflasi yang tinggi tentu saja mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Kedua, kegagalan pemerintah membentuk suatu aturan dalam upaya mewujudkan situasi yang kondusif bagi masyarakat. Pasca suatu negara terlepas dari rezim otoritarian, situasi dari negara tersebut cenderung tidak kondusif.pada masa seperti ini rentan untuk timbulnya konflik baru. Apabila segala konflik maupun

permasalahan yang ada pasca jatuhnya rezim yang otoriter tidak dapat diredam maka demokratisasi yang diimpikan akan sulit untuk diwujudkan. Kondusifitas di kalangan masyarakat perlu diperhatikan oleh pemerintah yang berkuasa untuk menciptakan iklim yang nyaman bagi masyarakat yang demokratis. Pemerintahan di masa Mursi dan Al Sisi diwarnai dengan banyaknya kericuhan akibat dari maraknya demonstrasi atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Seringnya terjadi kericuhan atau bentrokan antara masyarakat dengan aparat kepolisian mengakibatkan kondisi negara Mesir tidak memungkinkan dijadikan tempat yang baik bagi berseminya demokrasi di Mesir. Imbasnya yakni Presiden Mursi yang baru menjabat selama satu tahun harus dilengserkan melalui kudeta militer yang diawali oleh demonstrasi terhadap pemerintahan Mursi.

Ketiga, ketiadaan elemen masyarakat dalam proses konsolidasi sehingga demokrasi yang berkembang tidak dapat membudaya dalam praktek-praktek politik. Keterlibatan masyarakat terutama dalam proses demokratisasi sangat diperlukan demi menjaga kesatuan nasional sehingga mencegah adanya perpecahan diantara masyarakat. Peran masyarakat sipil sangatlah penting didalam demokrasi sebab masyarakat sipil melalui aktifitasnya dapat membawa kepada masyarakat yang lebih partisipatoris demi terwujudnya transisi demokrasi (Widjajanto, Monika, Kusumastuti, & Pangastuti, 2007) Partisipasi dari masyarakat untuk turut serta dalam mendukung pemerintahan tentu sangat dibutuhkan oleh pemerintahan itu sendiri. Adanya partisipasi masyarakat akan memudahkan kinerja dari wakil rakyat dalam mengambil keputusan yang berskala nasional. Partisipasi masyarakat juga akan memberikan kemudahan dalam melihat dari dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Apabila partisipasi dari rakyat rendah maka bagaimana bisa kebijakan tersebut

mewakili keseluruhan dari masyarakat. Partisipasi rakyat dianggap sangat penting demi terciptanya persatuan nasional.

Saat masyarakat tidak mau turut serta dalam proses konsolidasi, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan yang berskala nasional. Parlemen pun akan kebingungan dalam membuat regulasi yang bersinggungan dengan kehidupan bermasyarakat. Saat pihak militer mengambil alih pemerintahan dengan tujuan menciptakan kembali kondusifitas situasi di negara Mesir. Pihak militer telah membentuk sebanyak 3 kabinet yang berbeda dan dinilai gagal akibat tidak adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahan pada saat itu (Alin, 2016). Hal ini dikarenakan masyarakat Mesir masih mengggap pemerintahan transisi pada masa itu masih merupakan kepanjangan tangan dari rezim Mubarak serta menginginkan diselenggarakannya pemilu secepatnya. Pada pemilu pasca kudeta militer yang dilakukan terhadap pemerintahan Presiden Mursi hanya diikuti oleh 47,45 persen dari total pemilih tetap (Islam, 2014). Meskipun secara hitung-hitungan Mursi memenangkan pemilu, tetapi dilihat dari masyarakat yang mengikuti pemilihan umum yang tidak mencapai lebih dari 50 persen. Pemerintahan Al Sisi dianggap tidak memiliki legitimasi yang cukup untuk dapat memerintah di Negara Mesir karena minimnya partisipasi dari masyarakat untuk turut andil dalam memutuskan siapa yang berhak memimpin Mesir.

Keempat, sepeninggal dari pemerintahan yang otoriter, rezim tersebut akan mewariskan sejumlah kasus-kasus seperti pelanggaran HAM serta praktek KKN yang dilakukannya ketika menjadi penguasa. Ketika pemerintahan pasca rezim otoritarian tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat pemerintahan rezim yang otoriter atau malah memperparah permasalahan yang ada, maka kepercayaan

masayarakat terhadap pemerintahan yang memimpin akan menurun. Tidak adanya upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasa rezim otoritarian akan menghambat proses demokratisasi di suatu negara. Negara yang demokratis merupakan negara yang menghormati segala hak-hak yang dimiliki oleh individu. Suatu individu berhak mendapat keamanan tanpa intimidasi dari pihak manapun oleh karena itu negara berkewajiban memenuhinya. Sebagai negara yang menginginkan terciptanya demokrasi, Negara Mesir seharusnya terbebas dari unsur-unsur praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktek KKN ibarat parasit dari sebuah negara yang seharusnya dibasmi karena melenceng dari tujuan demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kepentingan pribadi tidak boleh diutamakan apabila proses dari demokratisasi ingin berjalan dengan lancar. Adanya pihak-pihak yang memanfaatkan jabatan serta kekuasaan untuk kepentingan individu atau golongan harus ditindak oleh negara.

Indeks persepsi korupsi yang diterbitkan oleh *Transparency Internasional* memperlihatkan bahwasanya Negara Mesir dari rentang tahun 2011 sampai 2016 selalu masuk kedalam salah satu negara terkotup di dunia dengan menggunakan skala 0 yang berarti suatu negara merupakan negara sangat korup, sampai 100 yang berarti negara tersebut tidak terdapat praktek korupsi atau sangat bersih. Pada tahun 2011, Mesir mendapat nilai 29, tahun 2012 mendapat nilai 32, tahun 2013 mendapat nilai 32, tahun 2014 mendapat nilai 37, tahun 2015 mendapat nilai 36, dan pada tahun 2016 mendapat nilai 34 (Corruption Perceptions Index 2016, 2017).

Di era kepemimpinan Mursi salah satu hal yang mendorong adanya tuntutan pengunduran dirinya yakni karena ia menjadikan kelompok Ikhwanul Muslimin sebagai anak emas dengan menempatkan para anggotanya

di berbagai jabatan strategis di pemerintahan Mesir. Negara Mesir seharusnya dijalankan oleh berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, bukan dijalankan oleh satu kelompok tertentu saja. Nepotisme di masa Mursi inilah yang menciderai semangat demokratisasi di Negara Mesir.

Masa kepemimpinan Al Sisi sendiri diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Presiden Al Sisi yang paling utama adalah cara ia memperoleh kekuasaan di Mesir dengan melalui kudeta militer terhadap pemerintahan Presiden Mursi. Tampuk kepemimpinan Negara Mesir yang seharusnya dipimpin oleh Muhammad Mursi dirampas oleh pihak militer melalui cara kekerasan. Melalui cara kudeta militer berarti pihak militer yang dipimpin oleh Al Sisi telah melakukan pelanggaran HAM berat yang mana telah merenggut hak dari seorang pemimpin yang sah dari suatu negara. Pada masa kepemimpinannya Al Sisi mengeluarkan kebijakan terhadap penangkapan para anggota Ikhwanul Muslimin selaku pihak oposisi yang mana merupakan kelompok pendukung dari Mursi. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat juga dibungkam di era Al sisi dengan menutup stasiun TV serta penangkapan wartawan.

D. Hipotesa

Demokratisasi di Negara Mesir pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Hosni Mubarak pada tahun 2011-2016 mengalami kegagalan karena:

1. Pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam hal melakukan perubahan untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi masyarakat
2. Terdapat warisan dari rezim otoritarian sehingga demokrasi yang berkembang tidak dapat membudaya

dalam praktek-praktek politik karena tidak adanya elemen masyarakat dalam proses konsolidasi

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode deduktif berdasarkan pada landasan teoritik yang akan ditarik sebuah hipotesa. Pengumpulan data menggunakan dua metode yakni metode berbasis dokumen dan metode berbasis internet (Bakry, 2017). Metode yang berbasis pada dokumen melibatkan dokumen sekunder sebagai dokumen yang berdasar pada dokumen primer serta laporan media untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode berbasis internet dipergunakan untuk mengoptimalkan proses pengumpulan data karena dalam mendukung suatu penelitian diperlukan adanya informasi faktual berkenaan dengan topik yang diangkat.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan dari penelitian ini yaitu berawal dari tahun 2011, dimana pada saat itu merupakan berakhirnya pemerintahan Presiden Hosni Mubarak yang telah menjabat selama 30 tahun masa kepemimpinannya. Dibatasi hingga tahun 2016, yang mana pada saat itu terjadi peristiwa dijatuhkannya hukuman penjara seumur hidup kepada para aktivis Ikhwanul Muslimin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab akan membahas mengenai sejarah asal muasal dari fenomena arab spring di Kawasan Timur Tengah. Membahas bagaimana kronologi dari fenomena arab spring yang terjadi di Mesir sehingga mengakibatkan turunnya Presiden Hosni Mubarak pada saat itu. Membahas mengenai dinamika setelah masa pemerintahan Mubarak sebelum dilaksungkannya pemilihan umum untuk menentukan presiden yang berasal dari pilihan rakyat.

BAB III akan membahas mengenai tanda-tanda dari adanya kegagalan dalam proses transisi demokrasi yang terjadi di Mesir. Dalam rentang waktu setelah Muhammad Mursi dilantik hingga pada masa pemerintahan Abdul Fattah Al Sisi di tahun 2016. Beberapa kebijakan maupun sikap yang diambil mencerminkan bahwasanya pemerintah telah melenceng dari demokrasi.

BAB IV akan membahas penyebab dari kegagalan dalam upaya mewujudkan proses demokratisasi di Mesir setelah berakhirnya rezim Mubarak yang diturunkan melalui sebuah gerakan revolusi sipil. Didasarkan pada teori yang digunakan oleh penulis sehingga menghasilkan sebuah hipotesa. Bab ini akan membuktikan hipotesa yang diperoleh oleh penulis pada penelitian ini.

BAB V akan berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi berdasarkan bab-bab sebelumnya.